

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Asia Pasifik dikenal sejak tahun 1980 ketika terjadinya perkembangan ekonomi di sektor perdagangan dan saham di kawasan ini. Secara geografis kawasan Asia Pasifik mencakup negara-negara yang berada disekitaran samudera Pasifik diantaranya yaitu, Jepang, Korea, Tiongkok, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Chile, Meksiko, Australia, dan Selandia Baru. Sebagian besar negara ini adalah dengan perkembangan ekonomi yang signifikan sejak abad ke 20.¹

Terdapat banyak kerjasama antara negara-negara di kawasan ini yang berguna untuk mencapai integrasi kawasan seperti, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), yang menunjukkan pada dunia bahwa integrasi kawasan telah tercipta. Asia Pasifik menjadi kawasan yang strategis bagi negara-negara untuk memaksimalkan *power* nya yang dilihat dari potensi Asia Pasifik sebagai suatu kawasan strategis untuk terjalannya kerjasama multilateral yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Hal inilah yang mendorong kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan ini.²

Dinamika ekonomi, politik, dan keamanan yang berkembang di Asia Pasifik menjadi tantangan bagi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai kekuatan dominan

¹ Jossept Parilla dan Jesus Leal Trujillo, "Asia-Pasific Metro-monitor: Engines of Global Growth 2014", *"The Brooking Institutions"*(2015) hal.4

² Dr Bates Gill, Dr Evelyn Goh, and Dr Chin Hao Huang, " The Dinamics of Us- China-Southesat Asia Relations " (2016) : hal 10
<https://www.ussc.edu.au/analysis/the-dynamics-of-us-china-southeast-asia-relations> (diakses 28 Desember 2017).

di kawasan Asia Pasifik untuk menjaga kestabilan di kawasan tersebut. Setelah perang dingin, pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik mulai menurun akibat perang Vietnam, sehingga pada saat itu muncul kekuatan dominan baru yang menyebarkan pengaruhnya di kawasan tersebut.³ Kekuatan tersebut adalah Tiongkok dengan fokus utamanya yaitu bidang ekonomi dan sejak saat itu, hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengalami perkembangan. Hingga di tahun 2015 Tiongkok menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia.⁴ Sehingga, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok, keduanya sama-sama mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Pada aspek ekonomi, posisi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik cukup strategis, selain sebagai negara eksportir terbesar di Asia Pasifik, Tiongkok juga berperan aktif pada organisasi perdagangan regional Asia Pasifik seperti, *Pacific Economic Cooperation Council (PECC)*, *Asia Pasific Economic Cooperations (APEC)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan *Council for Security Cooperation in Asia Pasific (CSCAP)*.⁵ Tiongkok telah berkontribusi secara substansial, terutama pada isu yang berkaitan dengan kerjasama teknis, usaha kecil dan menengah serta membentuk koordinasi ke APEC dan PECC dengan baik. Pada aspek keamanan, Tiongkok telah berkontribusi pada beberapa kerjasama atau kesepakatan keamanan, salah satunya

³ Sukawarsini Djelantik, *Konflik, Kerjasama, dan Relasi antarkawasan* (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2015)

⁴ Xenia Wickett, John Nilsson-Wright and Tim summer, "The Asia Pasific Power Balance Beyon The US-China Narrative (US Project and Asia Programme)".hal.75 (2015)

⁵ Jusuf Wanandi, " China and Asia Pasific Regionalism ," *The Rise of China and a Changing East Asian Order*; (ed. Kokubun Ryosei and Wang Jisi), "*Japan Center for International Exchange*" (2004) hal. 37-48

terlibat dalam kerjasama *Shanghai Security Cooperation Organization* bersama dengan Rusia dan beberapa negara di Asia Pasifik, serta peningkatan kerjasama Tiongkok di *Asean Regional Forum* (ARF) terlebih pada isu keamanan kawasan.⁶

Sedangkan Amerika Serikat sendiri mulai mengintensifkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik pada saat pemerintahan Barrack Obama melalui kebijakan *Rebalance Toward Asia-Pasific* (RTAP) yang meliputi aspek keamanan, ekonomi, dan diplomatik.⁷ Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya pertama, penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Darwin Australia pada tahun 2012.⁸ Penempatan pasukan militer ini ditujukan untuk meningkatkan pertahanan kedua negara dalam menghadapi ancaman Tiongkok dan menjaga dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.⁹ Kedua, kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Filipina tahun 2011 atau yang dikenal dengan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) untuk meningkatkan keamanan maritim di Filipina terkait konflik laut Cina Selatan.¹⁰ Ketiga, ditahun yang sama Amerika Serikat mengadakan peningkatan kerjasama militer dengan India dan pada aspek ekonomi, Amerika Serikat ikut bergabung ke *Trans-Pacific Partnership* (TPP).¹¹

Trans-Pacific Partnership merupakan suatu kesepakatan perdagangan yang pada awalnya hanya diinisiasi oleh 4 negara saja yang biasa disebut dengan *Pacific Four* (P4) yaitu, Singapura, Brunei Darussalam, Chile, dan Selandia Baru dan

⁶ *Ibid*

⁷ Joao Arthur Reis, China's Dua Responses to the Us Pivot, 2014, diakses dari : <http://atime.com/atimes/china/CHIN=01-240114.HTML>. (diakses 19 Januari 2018)

⁸ Revina Putri, "kepentingan Amerika Serikat dalam penempatan pasukannya di Darwin Australia" (Universitas Andalas, 2015) hal 61

⁹ *ibid*

¹⁰ Department of foreign affairs Philippines, <https://www.dfa.gov.ph/dfa-releases/2693-frequently-asked-questions-faqs-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement> (Diakses 28 Desember 2017)

¹¹ Trans-pacific partnership <http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/pages/trans-pacific-partnership-agreement-tpp.aspx>(Diakses pada 28 Desember 2017)

berlaku setelah adanya penandatanganan MoU di Wellington tanggal 28 Mei 2006. Kemudian pada tahun 2008 hingga 2010, beberapa negara di kawasan Asia Pasifik mulai bergabung ke dalam *Trans-Pacific Partnership*, sehingga jumlah negara yang tergabung adalah dua belas negara diantaranya yaitu, Australia, Kanada, Peru, Brunei, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Meksiko, Chile dan Vietnam.¹² Kesepakatan ini mencakup sebanyak 40% dari perekonomian dunia dan ditujukan untuk meliberalisasikan perdagangan dan investasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan manfaat sosial, menciptakan peluang baru bagi pekerja dan bisnis, berkontribusi untuk meningkatkan standar hidup, dan memberi manfaat bagi konsumen, serta mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.¹³

Kesepakatan *Trans-Pacific Partnership* berisikan seperangkat regulasi perdagangan yang mengatur mengenai produk dalam negeri untuk pasar internasional, hambatan perdagangan, investasi, perdagangan jasa internasional, jasa keuangan, perdagangan online dan telekomunikasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, kekayaan intelektual, tenaga kerja, lingkungan, dan lainnya yang bersifat mengikat (*legally binding*) bagi semua anggota.¹⁴ Negosiasi pertama *Trans-Pacific Partnership* diselenggarakan di Melbourne, Australia, pada bulan Maret 2010 dengan mengemukakan kesepakatan perdagangan bebas. Adanya kesepakatan ini, negara-negara anggota mendapatkan keuntungan dari sektor perdagangan

¹² Trans-Pacific Partnership agreement: an introduction.

<https://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/documents/tpp-overview.pdf>. (Diakses 28 Desember 2017)

¹³ Preamble, <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Preamble.pdf> (diakses pada 18 Januari 2018).

¹⁴ *Ibid*

dengan meningkatnya ekspor barang dengan pajak yang lebih rendah atau sesuai dengan kesepakatan *Trans-Pacific Partnership*.¹⁵

Pada bulan Desember 2009, Amerika Serikat mulai tertarik dan memutuskan untuk bergabung ke dalam inisiasi pembentukan *Trans-Pacific Partnership* pada masa pemerintahan Barrack Obama dengan fokus arah kebijakannya ke wilayah Asia termasuk Asia Pasifik.¹⁶ Melalui *Trans-Pacific Partnership*, Amerika Serikat berupaya meningkatkan pengaruhnya untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan ini.¹⁷ Pengaruh tersebut terlihat pada penetapan standar baru yang mengatur bisnis perdagangan Amerika Serikat dan mendukung ekspor produk *made in USA*, serta menghilangkan lebih dari 18.000 pajak dengan menetapkan tarif rendah bagi negara anggota yang memakai produk *made in USA*. Regulasi-regulasi inilah yang membuat negara-negara di Asia Pasifik tertarik untuk bergabung ke *Trans-Pacific Partnership*.¹⁸

Pasca terbentuknya *Trans-Pacific Partnership* sebagai kesepakatan perdagangan tanpa melibatkan Tiongkok, telah memicu reaksi dari Tiongkok sendiri yang hadir sebagai kekuatan baru di Asia Pasifik dengan *economic rising power*-nya dan memiliki pengaruh cukup besar di kawasan ini. Penstudi Tiongkok berpendapat bahwa bergabungnya Amerika Serikat ke *Trans-Pacific Partnership*

¹⁵ Trans-Pacific Partnership agreement: an introduction. <https://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/documents/tpp-overview.pdf>. (Diakses pada 28 Desember 2017)

¹⁶ New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade. "Trans-pacific Strategic Economic Partnership Agreement : Understanding The P4- The Original Agreement", <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationship-and-Agreements/Tran-Pasific/0-history.php>. (diakses pada 28 Desember 2017)

¹⁷ Joao Arthur Reis, "China's Dua Responses to the Us Pivot" (2014)

¹⁸ The Trans-Pasific Partnership: Overall U.S Benefits, <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Overall-US-Benefits-Fact-Sheet.pdf> (diakses 5 Februari 2018)

adalah untuk *geopolitical* dan membatasi kenaikan ekonomi Tiongkok dengan mengurangi ketergantungan negara-negara di Asia Pasifik terhadap Tiongkok.

Tiongkok sendiri memiliki kepentingan ekonomi dengan negara-negara anggota *Trans-Pacific Partnership* yang meliputi perdagangan dan investasi, dimana Tiongkok telah menjadi eksportir terbesar untuk beberapa negara anggota *Trans-Pacific Partnership* seperti, Australia, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Peru, Chile, dan Vietnam. Tiongkok telah menandatangani *Free Trade Agreement* (FTA) dengan banyak negara anggota *Trans-Pacific Partnership* termasuk dengan negara-negara anggota ASEAN, Chile, Meksiko dan Selandia Baru.¹⁹ Salah satu contohnya yaitu Tiongkok dan Australia yang memiliki perjanjian perdagangan bebas yaitu ChaFTA yang membuat ekspor Tiongkok ke Australia mengalami perkembangan pada tahun 2015.²⁰ Kehadiran *Trans-Pacific Partnership* tanpa melibatkan Tiongkok di dalamnya, berdampak negatif terhadap Tiongkok. Dampak tersebut adalah adanya pengalihan perdagangan, ketika mitra dagang Tiongkok mengalihkan perdagangan ke negara lain.²¹ Hal tersebut dikarenakan lebih dari sepertiga dari total ekspor Tiongkok adalah ke negara anggota *Trans-Pacific Partnership*.²²

Kehadiran Amerika Serikat di *Trans-Pacific Partnership* menyebabkan proporsi perdagangan Tiongkok dengan negara anggota *Trans-Pacific Partnership* dialihkan ke Amerika Serikat. Mereka lebih banyak mengimpor dari negara

¹⁹ Fan he and panpan yang, "China's Role in Asia's Free Trade Agreement", <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app5.66/full> (diakses pada 5 Februari 2018)

²⁰ China-Australia Free Trade Agreement Augments International Trade, <https://www.americanexpress.com/au/content/foreign-exchange/articles/china-australia-free-trade-agreement-for-international-trade/> (diakses pada 12 Februari 2018)

²¹ Fan he and panpan yang, "China's Role in Asia's Free Trade Agreement", <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app5.66/full> (diakses pada 5 Februari 2018)

²² *ibid*

anggota *Trans-Pacific Partnership* lainnya seperti Amerika Serikat, karena *Trans-Pacific Partnership* menawarkan penurunan tarif rendah untuk produk *made in USA*. Dalam keadaan seperti itu, *Trans-Pacific Partnership* menimbulkan ancaman serius terhadap ekspor Tiongkok ke negara anggota *Trans-Pacific Partnership*.²³ Sehingga pada saat itu, untuk mempertahankan posisi strategisnya di kawasan Asia Pasifik, Tiongkok menginisiasi terbentuknya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sebagai penyeimbang dari kehadiran *Trans-Pacific Partnership* pada tahun 2013.²⁴ RCEP sendiri meliputi regulasi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian perselisihan, *e-commerce*, usaha kecil dan menengah (UKM) dan isu lainnya.²⁵

Pada tahun 2016, presiden terpilih Donald Trump menyampaikan keinginannya untuk memutuskan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan *Trans-Pacific Partnership* yang disampaikan melalui video dengan durasi satu menit tiga puluh lima detik.²⁶ Presiden Amerika Serikat tersebut mengatakan bahwa negaranya akan menegosiasikan kesepakatan perdagangan bilateral yang adil dan membawa lapangan kerja, serta mengembalikan industri ke Amerika Serikat. Menurutnya kesepakatan tersebut merugikan perekonomian Amerika Serikat dan pernyataannya tersebut juga didukung oleh penelitian dari Jeronim Capaldo dan rekannya yang mengklaim bahwa kesepakatan tersebut mengurangi 448.000

²³ *ibid*

²⁴ Association of Southeast Asian Nations, Regional Comprehensive Economic Partnership, http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership (diakses pada 5 Februari 2018)

²⁵ *ibid*

²⁶ Trump says US to quit TPP on first day in, <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28059623> (diakses pada 23 Januari 2018)

pekerjaan di Amerika Serikat dan mengurangi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat serta pekerja pabrik akan kehilangan pekerjaan mereka dalam persaingan luar negeri.²⁷ Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* resmi dikeluarkan pada bulan Januari 2017.²⁸

Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan perdagangan besar-besaran di kawasan Asia Pasifik tersebut, tentunya menimbulkan respon dan tanggapan serius dari berbagai pihak termasuk Tiongkok sebagai *rising power* di kawasan tersebut. Tindakan Trump untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* dianggap memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk memaksimalkan *powernya* di kawasan Asia Pasifik.

Pada Kongres Partai Komunis ke-19, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, memperkuat kekuasaannya dengan memetakan visinya untuk Tiongkok selama 30 tahun ke depan. Dalam pidatonya tersebut, Xi Jinping menyinggung banyak hal yang memperlihatkan perkembangan Tiongkok selama 5 tahun terakhir serta menjelaskan strategi yang akan Tiongkok lakukan untuk memajukan negaranya. Tidak hanya menyinggung mengenai perkembangan nasionalnya, namun Xi Jinping juga menyinggung posisi Tiongkok di dunia Internasional.²⁹

Dari banyak hal yang dibahas, Xi Jinping menyebutkan bahwa hubungan internasional Tiongkok dengan cara komprehensif, bertingkat, dan multisektor telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pembangunan Tiongkok.

²⁷ Jeronim Capaldo, Alex Izurieta and Jomo Kwame Sundaram, "Trading Down: Unemployment, Inequality and Other Risks of the Trans-Pacific Partnership Agreement", "*Global Development and Environment Institute*", working paper No.16-01

²⁸ Trans-pasific Agreement,
<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership>

²⁹ Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress,
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm
(diakses pada 13 Februari 2018)

Tiongkok telah terlibat dalam *Belt and Road Initiative*, membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, menjalankan *Silk Road Fund*, menjadi tuan rumah pertama *Belt and Road Forum for International Cooperation*, mengikuti pertemuan pemimpin APEC ke 22. Menurut Xi Jinping, akan terdapat peningkatan pengaruh Tiongkok di dunia internasional, kemampuan untuk menginspirasi, dan kekuatan untuk membentuk dan berkontribusi besar terhadap perdamaian dan pembangunan global.³⁰

Selain itu, Pada KTT CEO APEC tahun 2017 di Da Nang Vietnam, Presiden Xi Jinping juga memberikan pidatonya yang berjudul *Seizing the Opportunity of a Global Economy in Transition and Accelerating Development of the Asia-Pacific*.³¹ Dalam pidatonya tersebut presiden Xi Jinping mengatakan:³²

We are seeing a profound change in the system of global economic governance. The evolving global economic environment demands more from the system of global economic governance. We should uphold multilateralism, pursue shared growth through consultation and collaboration, forge closer partnerships, and build a community with a shared future for mankind. This, I believe, is what we should do in conducting global economic governance in a new era.

Pidatonya tersebut berkaitan dengan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan perdagangan multilateral *Trans-Pacific Partnership* dan lebih mengedepankan kerjasama bilateral dengan negara kuat. Berdasarkan pidatonya tersebut, Presiden Xi Jinping melihat dalam sistem tata kelola ekonomi global dan lingkungan ekonomi global yang terus berkembang, maka negara-negara harus menjunjung tinggi kerjasama multilateral, mengejar pertumbuhan bersama melalui konsultasi dan kolaborasi, menjalin kemitraan yang lebih erat, dan membangun sebuah komunitas dengan masa depan bersama bagi

³⁰ *ibid*

³¹ Full text of Chinese President Xi's Address at APEC CEO Summit, http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-11/11/content_34393531.htm

³² *ibid*

umat manusia. Melalui pidatonya tersebut, Xi Jinping berusaha melihat peluang yang didapat dari keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* dan mengemukakan upaya-upayanya untuk sistem tata kelola ekonomi era baru.

Berdasarkan pernyataannya tersebut, dapat dilihat bahwa Tiongkok akan memperkuat posisinya di dunia internasional termasuk di Asia Pasifik melalui upaya-upaya dengan melihat peluang dan kesempatan yang ada. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui kesepakatan-kesepakatan perdagangannya yang melibatkan negara-negara di kawasan tersebut bahkan lebih luas lagi. Seperti RCEP, APEC dan *Belt and Road Initiative*.

Didalam fenomena diatas, terlihat bahwa dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama mempertahankan pengaruh dan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik. Keduanya menjadi kekuatan besar dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masing-masing negara terhadap kawasan ini. Akan tetapi, keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* tentunya menimbulkan implikasi terhadap keberadaan Tiongkok sebagai *rising power* di kawasan tersebut. Mundurnya salah satu dari kekuatan besar dunia dari kesepakatan besar disuatu kawasan, tentu Tiongkok sebagai *rising power* di kawasan tersebut mendapatkan keuntungan, karena dapat dijadikan sebagai kesempatan dan peluang untuk Tiongkok meningkatkan *powernya* di kawasan Asia Pasifik untuk menciptakan stabilitas hegemoninya di kawasan ini.

1.2. Rumusan Masalah

Di kawasan Asia Pasifik telah terjadi perebutan dominasi oleh dua kekuatan besar yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat, dimana kedua negara saling

mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan. Dengan berbagai kebijakan penyeimbang untuk sama-sama mempertahankan posisi strategi masing-masing di kawasan ini. Keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* sebagai kesepakatan perdagangan yang besar dan cukup berpengaruh, memberikan peluang bagi Tiongkok untuk meningkatkan dominasinya di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok sebagai *rising power* di kawasan tersebut, dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai kesempatan dan peluang untuk meningkatkan dominasi atau *powernya* demi membentuk stabilitas hegemoninya di kawasan Asia Pasifik.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah: Bagaimana upaya Tiongkok dalam membentuk stabilitas hegemoni di kawasan Asia Pasifik tahun 2011-2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Tiongkok dalam membentuk stabilitas hegemoni di kawasan Asia Pasifik tahun 2011-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Menambah informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mengenai upaya Tiongkok dalam membentuk stabilitas hegemoni di kawasan Asia Pasifik tahun 2011-2018.

2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional mengenai bagaimana stabilitas hegemoni Tiongkok di kawasan Asia Pasifik terkait keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership*
3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.

1.6. Studi Pustaka

Pertama, mengacu pada tulisan Mario Esteban yang berjudul *The foreign policy of Xi Jinping after the 19th Congress: China strives for a central role on the world stage*.³³ Dalam tulisannya, penulis membahas mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok dalam meningkatkan perannya dalam tatanan internasional. Setelah kongres ke 19 partai komunis Tiongkok, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menunjukkan kebijakan yang akan diambil Tiongkok selama lima tahun kedepan adalah kebijakan yang lebih asertif untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok dalam pemerintahan global dan mengintensifkan kebijakan yang telah ia ambil sebelumnya dan mengambil keuntungan yang dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat.

Penulis menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, terfokus pada diplomasi khususnya pada pemanfaatan peluang dari kebijakan yang dikeluarkan Trump untuk meningkatkan pengaruhnya di tatanan internasional, terutama di wilayahnya sendiri. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat membuat citra Amerika Serikat di mata internasional menurun. Oleh karena

³³ Mario Esteban, "The foreign policy of Xi Jinping after the 19th Congress: China strives for a central role on the world stage", *Real Instituto elcano Royal institute*. ARI 87 (2017)

itu, Tiongkok memobilisasi semua instrumen kebijakan luar negerinya dengan mengisi ruang yang telah ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Kemudian menegaskan kembali komitmen Tiongkok terhadap perdagangan bebas dan kepentingan investor asing serta mengutamakan kepemimpinannya dalam kerja sama internasional. Dalam tulisannya, penulis juga mengatakan bahwa Tiongkok akan mengalami perkembangan selama lima tahun kedepan dan menjadi kekuatan yang bertanggung jawab dan berkomitmen dalam penyediaan barang publik global.

Kedua, melalui tulisan Dr. George N. Tzogopoulos yang berjudul *Trump, Globalization, and China*.³⁴ Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan *Trans-Pacific Partnership* dan menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat lebih memilih kesepakatan perdagangan bilateral dibandingkan multilateral dan menerapkan kebijakan proteksionisme, dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan Tiongkok. Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut secara langsung menentang kebijakan *Pivot to Asia* pada masa pemerintahan Barack Obama, sehingga memicu timbulnya perdebatan internasional mengenai dampak yang ditimbulkan. Sebelum kemenangan Trump, Tiongkok telah menyiapkan beberapa agenda diantaranya pembentukan *Free Trade Area Asia-Pacific* (FTAAP) serta *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) untuk menanggapi prospek *Trans-Pacific Partnership* kedepannya.

Pada analisis akhir, penulis menyebutkan keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* dan vakumnya kebijakan Amerika Serikat di Asia tidak

³⁴ Dr. George N. Tzogopoulos, "Trump, Globalization, and China", "*BESA Center Perspectives Paper*" No. 588, (2017)

akan secara langsung menghasilkan keuntungan bagi Tiongkok atau membuat Tiongkok menjadi pemimpin globalisasi baru di dunia. Namun Keuntungan tersebut akan didapat Tiongkok apabila melakukan upaya-upaya untuk penyebaran pengaruhnya di Asia dengan peluang yang ada.

Ketiga, laporan *S. Rajaratnam School of International Studies (RSiS)* dari Chia-yi Lee dan Su-Hyun Lee yang berjudul *The Trump Era and The Trade Architecture in The Asia Pasific*.³⁵ Laporan ini memuat beberapa analisis dari para ahli ekonomi politik internasional tentang perubahan sifat arsitektur perdagangan di Asia Pasifik di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh pemilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat serta diskusi mencakup berbagai isu, termasuk Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kesepakatan perdagangan bebas mega-regional yang sedang berlangsung, dan tantangan serta prospek kerjasama regional dalam liberalisasi perdagangan.

Laporan ini menggambarkan bagaimana seharusnya pemerintah di kawasan Asia Pasifik bereaksi dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh presiden Trump khususnya dalam arsitektur perdagangan dan isu lainnya. Pertama, liberalisasi dan fasilitasi perdagangan di wilayah tersebut bisa lebih baik apabila dicapai melalui sistem perdagangan multilateral daripada yang bilateral. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus lebih aktif mengejar *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Free Trade Area Asia-Pacific (FTAAP)* sebagai alternatif untuk TPP. Ruang lingkup yang *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* tidak seluas *Trans-Pacific Partnership*. Dengan

³⁵ Chia-yi Lee dan Su-Hyun Lee, "The Trump Era and The Trade Architecture in The Asia Pasific". *S. Rajaratnam School of International Studies (RSiS)*, (2017)

menambahkan lebih banyak negara *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bisa menjadi sebuah blok bangunan untuk perdagangan sistem multilateral di mana negara-negara berkembang memperoleh keuntungan dalam ekonomi global. Kedua, meskipun isu multilateralisme perdagangan penting, namun hubungan Amerika Serikat di bidang keamanan juga tak kalah penting. Pemerintahan Amerika Serikat yang fokus kepada hubungan bilateral, membuat negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah Amerika Serikat. Keempat, Sebaliknya, negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus menggunakan kesempatan ini untuk memperdalam kerjasama regional di antara mereka sendiri. Kerja sama tersebut sebaiknya dibangun di atas kerangka kerja yang ada seperti ASEAN + 3, ASEAN + 6, dan APEC sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan upaya negosiasi kerangka kerja institusional baru tetapi memperkuat yang sudah ada.

Keempat, melalui tulisan Marek Wąsiński, Damian Wnukowski yang berjudul *Consequences of the U.S. Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership*.³⁶ Dalam tulisan ini penulis menggambarkan mengenai konsekuensi yang diterima Amerika Serikat setelah mundur dari kesepakatan *Trans-Pacific Partnership*. Menurutnya, meninggalkan *Trans-Pacific Partnership* sangat berpotensi menurunkan pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik itu sendiri dan memperburuk citranya sebagai mitra yang kredibel. Terlebih lagi, ini menjadi simbol berakhirnya era Obama "*Pivot to Asia*," di mana komponen ekonomi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesuksesan

³⁶ Marek Wąsiński and Damian Wnukowski, "Consequences of the U.S. Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership", *polski instytut spraw Miedzynardowych The Polish Institute of International Affairs* (PISM), No.3 (87) (2017)

terbesarnya. Sebaliknya, administrasi Trump cenderung menggunakan negosiasi bilateral untuk memaksimalkan manfaat ekonomi untuk Amerika Serikat dan keluar dari kesepakatan tersebut akan lebih sulit dan mungkin berdampak negatif jaringan aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Kelima, tulisan Hiro Lee yang berjudul *U.S. Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership and the Effects of Alternative Trade Integration Scenarios in the Asia-Pacific*.³⁷ Tulisan ini menyebutkan bahwa Penarikan Amerika Serikat dari Kemitraan *Trans-Pacific Partnership* memiliki pengaruh terhadap prospek kesepakatan perdagangan mega-regional di *transpacific* dan *transatlantic*. Di Asia Pasifik, negosiasi untuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bisa meningkat dengan cepat. Hal ini juga masuk akal bahwa 11 negara penandatangan *Trans-Pacific Partnership* lainnya memutuskan untuk melakukannya menerapkan *Trans-Pacific Partnership* tanpa Amerika Serikat.

Keenam, melalui tulisan Li Chunding and John Walley, yang berjudul "*China and The Trans-Pacific Partnership Agreement*".³⁸ Dalam tulisan ini peneliti melihat bahwa kehadiran *Trans-Pacific Partnership* tanpa melibatkan Tiongkok akan mempengaruhi kesejahteraan Tiongkok. Meskipun sedikit *Trans-Pacific Partnership* tetap mengancam Tiongkok. Menanggapi hal tersebut penulis menyarankan Tiongkok menggunakan empat pendekatan untuk menanggapi *Trans-Pacific Partnership*. Pertama adalah mempromosikan pengembangan Tiongkok melalui daerah baru dan FTA bilateral, seperti RCEP dan Tiongkok-Jepang-Korea

³⁷ Hiro Lee U.S. , "Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership and the Effects of Alternative Trade Integration Scenarios in the Asia-Pacific", "*Osaka School of International Public Policy*" (2017)

³⁸ Li chunding and john walley, "China and The Trans-Pasific Partnership Agreement, *Gigi Papers*, no.102 (Mei 2016).

FTA termasuk negosiasi keamanan akses pasar. Kedua adalah untuk menegosiasikan FTA bilateral dengan Amerika Serikat dan untuk mempromosikan pengembangan FTA Tiongkok-Amerika Serikat. Strategi ketiga adalah melakukan negosiasi untuk bergabung ke *Trans-Pacific Partnership* sesegera mungkin. Strategi terakhir adalah mempromosikan dan membuka reformasi domestik .

Keenam tulisan diatas berkontribusi dan membantu penulis dalam meneliti permasalahan ini, bahwa pada tulisan pertama berkontribusi pada bab empat yang menjelaskan mengenai kebijakan Tiongkok yang memfokuskan pada bidang ekonomi, setelah Amerika Serikat keluar dari *Trans-Pacific Partnership*. Tulisan kedua dan ketiga, berkontribusi pada bab dua dan empat, yang mana Tiongkok akan mengejar kerjasama-kerjasama regional seperti RCEP setelah Amerika Serikat Amerika Serikat keluar dari *Trans-Pacific Partnership*. Tulisan keempat dan kelima berkontribusi pada bab dua, bahwa keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* adalah suatu hal yang merugikan Amerika Serikat dan akan memberikan peluang bagi Tiongkok untuk memaksimalkan hegemoninya. Tulisan terakhir, berkontribusi pada bab empat yaitu, terdapat beberapa strategi yang di ajukan penulis untuk Tiongkok melakukan upaya-upayanya dalam meningkatkan FTAny dengan negara-negara di Asia Pasifik.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Hegemonic Stability

Hegemon merupakan kekuatan ekonomi dan militer dominan yang diperlukan untuk penciptaan dan pembangunan sepenuhnya perekonomian pasar dunia yang liberal, karena jika kekuatan tersebut tidak mengandung aturan-aturan

liberal didalamnya maka penciptaan tersebut tidak akan terlaksana. Inilah yang disebut teori stabilitas hegemoni yang berasal dari pemikiran merkantilisme. Tetapi, teori stabilitas hegemoni tidak murni merkantilisme karena terdapat elemen liberalnya yaitu kekuatan dominan tidak hanya memanipulasi hubungan ekonomi internasional bagi dirinya, kekuatan dominan menciptakan suatu perekonomian dunia yang terbuka berdasarkan perdagangan bebas yang bermanfaat bagi semua negara yang berpartisipasi bukan hanya negara hegemon.³⁹

Teori stabilitas hegemoni merupakan teori yang pertama kali dipopulerkan oleh Charles Kindleberger di tahun 1973 dimana fokus perhatiannya yang terletak pada peranan negara-negara maju pada sektor ekonomi. Tujuan utama *Hegemonic stability* adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi internasional. Menurut Charles Kindleberger pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa tindakan dominasi oleh satu negara hadir untuk mempertahankan keberlangsungan sistem ekonomi yang stabil dan terbuka.⁴⁰ Teori stabilitas hegemoni penting dalam memahami stabil dan ketidakstabilan ekonomi politik internasional. Tanpa adanya kekuatan yang menghegemoni maka stabilitas internasional tidak akan tercipta.⁴¹ Menurut teori ini, perlunya kekuatan hegemoni harus berkaitan dengan sifat dari barang-barang yang disediakannya. Perekonomian dunia terbuka juga disebut barang publik atau kolektif, yaitu barang dan jasa.

³⁹ Robert Jakson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005)

⁴⁰ Kindleberger Charles P, “ Dominance and leadership in the international economy. *International Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 2 (1981) 25(2): 242–254

⁴¹ Assoc. Prof. Dr.Mohd. Noor Mat Yazid, “ The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability”, “*Global Journal of Political Science and Administration*” No.6, Vol.3, hal 67 (2015)

Beberapa argumen utama teori stabilitas hegemoni menurut Charles Kindleberger diantaranya yaitu, terdapat kekuatan tunggal dalam sistem internasional untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik internasional, kekuatan hegemoni tersebut dapat mengarahkan kontrolnya atas sistem internasional, peran kekuatan hegemoni adalah *stabilizer*, maksudnya bahwa kekuatan hegemoni adalah kekuatan terkuat diantara negara bagian, kekuatan hegemoni memiliki dorongan untuk menyediakan “*public goods*”, kekuatan hegemoni memiliki kemampuan untuk menjadi posisi terkuat dalam bidang militer, ekonomi, dan politik. Terakhir kekuatan hegemoni diperlukan untuk mendorong kerjasama internasional⁴²

Menurut teori stabilitas hegemoni Kindleberger, aktivitas hegemon yang menunjukkan upaya untuk membentuk stabilitas hegemoni adalah sebagai berikut ;

1. Tetap menyediakan *public goods*

Menurut Kindleberger, *public goods* merupakan barang dan jasa yang bersifat *nonrival in consumption* dan *non-excludable*, maksudnya adalah bahwa tindakan satu pihak untuk mengkonsumsi satu barang atau jasa tidak akan menghalangi pihak lain untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Kemudian *non-excludable* adalah kondisi dimana, barang dan jasa tersebut juga tidak mengecualikan pihak yang tidak membayar untuk menikmati barang tersebut.⁴³

Public goods dalam sistem internasional dapat berupa bantuan luar negeri baik ekonomi maupun keamanan, fasilitas finansial, lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain. Dalam hal ini, kekuatan hegemoni akan menyediakan *public good* ke

⁴² Kindleberger Charles P, “ Dominance and leadership in the international economy. *International Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 2 (1981) 25(2): 242–254

⁴³ *ibid*

negara-negara kecil disekitarnya untuk mempertahankan kekuatan hegemoninya demi menciptakan stabilitas hegemoni di dalam sistem tersebut.

2. Mendorong kerjasama Internasional untuk menciptakan regulasi-regulasi perdagangan yang terbuka,

Maksud dari perdagangan terbuka disini adalah perdagangan bebas yang merupakan bagian dari sistem perekonomian terbuka. Kekuatan hegemoni diperlukan untuk mendorong kerjasama ekonomi internasional, maksudnya adalah bahwa kekuatan hegemoni akan mendorong dan memiliki peran yang penting serta aktif dalam setiap kerjasama ekonomi internasional. Dalam hal ini, kekuatan hegemoni menunjukkan bahwa sebuah kekuatan dominan mampu untuk terlibat dan mendorong jalannya kerjasama ekonomi internasional.

3. Mendorong sistem ekonomi internasional terbuka dalam artian yaitu, meningkatkan perdagangan bebas, meningkatkan investasi dan pasar modal, serta transfer pengetahuan.

Sistem ekonomi internasional terbuka adalah salah satu sistem ekonomi dimana satu entitas dapat berinteraksi secara bebas dengan entitas lainnya di seluruh dunia. Sistem ekonomi terbuka berbeda dengan sistem ekonomi tertutup, sistem ekonomi terbuka menawarkan penghilangan hambatan-hambatan perdagangan. Dalam sistem ekonomi terbuka terdapat dua cara berinteraksi yaitu membeli dan menjual barang dan jasa di pasar internasional dan membeli dan menjual aset dan modal di pasar keuangan dunia.⁴⁴

⁴⁴ Harcourt, "Open-Economy: Basic Concepts", 2001 https://windward.hawaii.edu/facstaff/briggs-p/macroeconomics/chap_31internationaleconomy.pdf, (diakses pada 11 April 2018)

Pada sistem ini terdapat arus barang yang dikenal dengan Ekspor dan Impor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri, sedangkan impor adalah barang dan jasa produksi luar negeri dan dijual di dalam negeri. Dalam sistem ini juga terdapat defisit perdagangan, yaitu situasi di mana nilai impor lebih besar dari pada ekspor, sedangkan surplus perdagangan adalah situasi di mana bersih ekspor (NX) positif atau nilai ekspor lebih besar dari pada impor.⁴⁵

4. Meningkatkan kekuatan ekonomi domestik

Kekuatan hegemoni memiliki posisi ekonomi terkuat diantara negara dalam sistem tersebut. Dalam membentuk stabilitas hegemoni, kekuatan hegemoni akan berupaya mempertahankan posisinya tersebut dengan cara meningkatkan kekuatan ekonomi domestik.

Menurut Kindleberger;⁴⁶

“a liberal economic order needs leadership, a country which is prepared, consciously or unconsciously, under some system of rules it has internationalized, to set standards of conduct for other countries; and to seek to get others to follow them”.

Sejalan dengan itu, Robert Gilpin berpendapat bahwa ekonomi internasional yang liberal dapat dilakukan hanya dibentuk dan dipertahankan melalui dukungan negara yang paling kuat atau negara bagian dalam sistem. Dengan istilah tatanan ekonomi liberal, baik Kindleberger dan Gilpin mengacu pada ekonomi internasional dengan pasar terbuka dan dengan konversi mata uang yang tersedia. Dalam pandangan Gilpin, upaya sebuah negara dalam posisi

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Victor Edward Sachse, “Hegemonic Stability Theory: An Examination”, (Louisiana State University, 1989) hal 4

hegemoni diperlukan untuk menjamin perdagangan bebas yang aman, investasi asing, dan sistem ekonomi internasional yang baik.⁴⁷

Kemudian, Robert Keohane mengembangkan teori Kindleberger dengan menjelaskan hubungan antara ekonomi negara hegemoni dan sistem perdagangan internasional. Menurutnya, negara hegemon tunggal harus memiliki akses terhadap bahan baku, menguasai pasar modal, memelihara pasar untuk impor, dan memiliki keunggulan komparatif pada barang dengan nilai tambah yang tinggi, upah dan keuntungan yang relatif tinggi. Dimensi ekonomi dan perdagangan negara hegemon haruslah lebih kuat dari pada negara lain. Asumsi lainnya bahwa kestabilan sistem internasional membutuhkan kekuatan hegemoni yang berpartisipasi dalam kerja sama antara negara-negara dalam sistem tersebut.⁴⁸ Melalui kerjasama-kerjasama tersebut dilakukan upaya-upaya agar sistem ekonomi internasional tetap terbuka.

Terdapat empat kekuatan agar suatu negara dapat dikatakan sebagai hegemon:⁴⁹

1. Kemampuan untuk mengancam atau melindungi keamanan fisik negara lain dengan beralih ke senjata (elemen keamanan).
2. Kemampuan untuk mengendalikan sistem produksi barang dan jasa global (elemen produksi).
3. Kemampuan untuk membentuk pasar modal dan kredit internasional (elemen keuangan).

⁴⁷ *Ibid* hal 5

⁴⁸ Keohane, Robert, O.,1984. "After Hegemony Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, NJ; Princeton University Press, hal.33-39

⁴⁹ Suzan strang, "The Persistent Myth of Lost Hegemony," *International Organization*, (1987)vol. 41, 1987, p. 565.

4. Kemampuan mengarahkan pengembangan, akumulasi dan transfer pengetahuan (elemen pengetahuan).

Tiongkok hadir sebagai negara *rising power* di kawasan Asia Pasifik yang membuatnya menempati posisi dominan dan strategis di kawasan ini. Posisinya sebagai kekuatan hegemoni di Asia Pasifik diperlukan untuk menjamin keberlangsungan stabilitas ekonomi internasional di kawasan tersebut. Berdasarkan teori stabilitas hegemoni, Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni diharapkan mampu menstabilkan sistem ekonomi internasional yang terbuka pasca keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan *Trans-Pacific Partnership*.

1. 8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan penelitian literatur sebagai metode utama penelitian. Penelitian kualitatif dengan kemampuannya untuk beradaptasi menawarkan karakter yang fleksibel, berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan, jurnal ilmiah, website dan artikel-artikel resmi, surat kabar ataupun situs online dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan upaya Tiongkok dalam membentuk stabilitas hegemoni. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah yang diteliti secara teliti dan lengkap.

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada upaya-upaya Tiongkok dalam menjaga hegemoninya dimulai dari sebelum hingga setelah keluarnya

Amerika Serikat dari kesepakatan *Trans-Pacific Partnership* yaitu dibatasi sejak tahun 2011 ketika Amerika Serikat mengembalikan fokus kebijakannya di kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2018, ketika Amerika Serikat resmi keluar dari *Trans-Pacific Partnership* dan ruang lingkup penelitian terfokus pada aspek ekonomi.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit Analisis di dalam penelitian ini adalah Tiongkok yang sekaligus menjadi objek yang akan dijelaskan.⁵⁰ Sedangkan unit eksplenasinya adalah Hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia pasifik, dimulai dari tahun 2011 ketika Amerika Serikat mulai meintensifkan pengaruhnya di kawasan ini melalui RTAP hingga tahun 2018 ketika Amerika Serikat telah resmi keluar dari *Trans-Pacific Partnership*. Untuk tingkat analisis penelitian ini adalah sistem internasional yang mengacu kepada negara-negara di Asia Pasifik seperti yang telah dijelaskan di latar belakang..

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif terdapat dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pidato-pidato pejabat penting secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang secara keseluruhan diambil dari penelitian atau temuan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan yang bersumber dari data sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah yang sebelumnya membahas mengenai

⁵⁰ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1990) hal.35

stabilitas hegemoni dan dominasi negara di kawasan Asia Pasifik, penelitian-penelitian sebelumnya yang menyangkut mengenai hegemoni Tiongkok ketika Amerika Serikat hadir di Asia Pasifik, dari website resmi Tiongkok mengenai jaringan FTA di seluruh dunia, website resmi kerjasama-kerjasama ekonomi internasional, dari pidato-pidato presiden Xi Jinping yang telah di publikasikan, dan dari berita dan situs online internasional yang terpercaya.

1.8.4. Teknik Pengolahan Data

Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah yang sebelumnya membahas mengenai stabilitas hegemoni dan dominasi negara di kawasan Asia Pasifik, penelitian-penelitian sebelumnya yang menyangkut mengenai hegemoni Tiongkok ketika Amerika Serikat hadir di Asia Pasifik, dari website resmi Tiongkok mengenai jaringan FTA di seluruh dunia, website resmi kerjasama-kerjasama ekonomi internasional, dari pidato-pidato presiden Xi Jinping yang telah di publikasikan, dan dari berita dan situs online internasional yang terpercaya, selanjutnya diolah dan dideskripsikan secara tekstual dengan menganalisa isi dari sumber tersebut. Pengolahan data-data diatas menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada akan dianalisis dengan menetapkan, menjelaskan ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data diartikan sebagai proses pengelompokan dan penginterpretasian data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisa data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola hubungan umum dalam

kelompok data yang menjadi dasar penarikan kesimpulan.⁵¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif, dimana peneliti menampilkan beberapa fakta mengenai posisi Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan ini, kepentingan kedua negara, hubungan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia Pasifik, fakta mengenai kerjasama ekonomi dan FTA Tiongkok di kawasan ini, dan mengenai upaya yang dilakukan Tiongkok untuk membentuk stabilitas hegemoninya.

Fakta dan fenomena diatas, kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu, *Hegemonic Stability*, yang merupakan teori yang mampu menjelaskan kemampuan Tiongkok sebagai *stabilizer* untuk menstabilkan sistem ekonomi internasional yang terbuka melalui upaya-upaya yang telah Tiongkok lakukan. Upaya-upaya Tiongkok, dianalisa menggunakan empat indikator dari teori *Hegemonic Stability* yaitu, tetap menyediakan *public goods*, mendorong kerjasama internasional untuk menciptakan regulasi-regulasi perdagangan yang terbuka, mendorong sistem ekonomi internasional terbuka dalam artian yaitu meningkatkan perdagangan bebas, meningkatkan investasi, dan pasar modal, serta transfer pengetahuan, Terakhir meningkatkan kekuatan ekonomi domestik.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB.I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang yang berisikan fakta-fakta yang dijadikan acuan untuk merumuskan masalah dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah

⁵¹ Catherine Marshall an Gretchen B. Rosstman, hal 150

itu sendiri, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, batasan masalah, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Hegemoni Amerika Serikat dan Posisi Tiongkok terhadap Hegemoni tersebut

Bab ini berisi penjelasan mengenai hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dan posisi Tiongkok terhadap hegemoni Amerika Serikat tersebut. Dimulai dari sebelum bergabungnya Amerika Serikat ke *Trans-Pacific Partnership* hingga bergabungnya Amerika Serikat kedalam *Trans-Pacific Partnership* ditahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2015.

BAB III. Kepentingan Ekonomi Tiongkok di Asia Pasifik

Bab ini akan menjelaskan mengenai kepentingan ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Termasuk kepentingan Tiongkok terhadap negara-negara *Trans-Pacific Partnership* di Asia Pasifik.

BAB IV. Upaya Tiongkok membentuk Stabilitas Hegemoni Tiongkok di kawasan Asia Pasifik

Bab ini akan menjelaskan bagaimana Upaya yang dilakukan Tiongkok membentuk stabilitas hegemoni Tiongkok di kawasan Asia pasifik pasca keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan *Trans-Pacific Partnership*.

BAB V. Penutup / Kesimpulan

Bab V ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil terpenting yang didapatkan dari penelitian ini.